

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *MAPPASANRA*
TANAH SAWAH
(Studi Kasus Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NURUL HAZANAH

NIM: 10300113049

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hazanah
NIM : 10300113049
Tempat/Tgl. Lahir : Herlang, 05 Maret 1995
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Tamarunang
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Mapassanrra Tanah Sawah
(Studi Kasus Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba)

Penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, November 2017

Penyusun,



NURUL HAZANAH
NIM : 10300113049

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Mappasanra Tanah Sawah (Studi Kasus Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba)*", yang disusun oleh *Nurul Hazanah*, NIM: 10300113049, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 M, bertepatan 10 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 29 November 2017 M.

10 Rabiul Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Sekretaris : Dr. Hamsir, M.Hum
Munaqisy I : Dr. Hj. Rahmatiah HL. M. Pd
Munaqisy II : Dr. Kurniati, M.HI
Pembimbing I : Dr. H. Abd. Wahid Haddade Lc. M.HI
Pembimbing II : Rahmiati, S.Pd., M.Pd

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا يَهْدِهِ الْإِلَهَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا

Alhamdulillahillobbil-‘alamin segala puji bagi Allah swt. yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, untuk memenangkannya diatas segala agama, walaupun orang musyrik menyebar kebencian. Penulis bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah swt. dan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah utusan Allah swt. yang senantiasa memberi petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek *Mapassanra* Tanah Sawah (Studi Kasus Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana S1 pada jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami berbagai rintangan dan tantangan karena keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan ilmiah, waktu, biaya dan tenaga. Dengan komitmen yang kuat serta adanya petunjuk dan saran-saran dari berbagai pihak, semua tantangan dapat diminimalkan. Maka dari itu semu pihak yang telah memberikan bantuannya, penulis mengucapkan bnyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari, M.Si.
Wakil Rektor I UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Mardan M. Ag, Wakil

Rektor II UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Lomba Sultan dan Wakil Rector III UIN Alauddin Makassar Dr. Siti Aisyah Kara, MA. Phd.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag., Wakil Dekan I, Dr. H. Abd. Halim Talli, S. Ag., M. Ag., Wakil Dekan II, Dr. Hamsir, SH., M.Hum. dan Wakil Dekan III, Dr. H. M. Saleh Ridwan, M. Ag.
3. Ketua Jurusan Hukum Pidana Ketatanegaraan, Dra. Nila Sastrawati M.Si dan Dr. Kurniati M.Hi selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, dengan rasa tulus memberikan arahan, motivasi dan nasehat selama penulis menempuh kuliah.
4. Dr. H. Abd. Wahid Haddade, Lc., M.Hi selaku pembimbing I, dan Rahmiati S.Pd., M.Pd selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, mengarahkan serta membimbing penulis saat konsultasi.
5. Dr. Hj. Rahmatiah HL. M.Pd selaku Munaqisy I, dan Dr. Kurniati M.Hi selaku Munaqisy II, yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi dan mengarahkan penulis dalam penyempurnakan skripsi ini.
6. Seluruh Pengelola Perpustakaan dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin atas kontribusinya kepada penulis dalam membantu menyediakan berbagai literatur ilmiah.
7. Nur Asita, Egi Suarman, A.Basofi Iskandar, Nurhidayah A.Hambali Rosmini, Masnayanti, Salma dan Fitriani.A, S.H selaku teman dekat yang selalu memberikan dukungan semangat dan juga motivasi selama penyusunan skripsi ini.

8. Teman-teman KKN Ang 54 Kabupaten Bantaeng Kecamatan Tompobulu khususnya Posko 4 Kelurahan Lembang G.Keke yang memberi warna yang berbeda selama 2 bulan dan memberi motivasi yang luar biasa dalam penulisan skripsi ini.
9. Penulis persembahkan karya ini kepada kedua orang tua tercinta Bapak Abd. Hakim dan Ibu Syamsiah yang selalu memberi penulis nasehat, semangat kasih sayang, dan rasa tulus ikhlas membesarkan dan mendidik penulis dalam meraih pendidikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi. Serta kepada saudari penulis, Adik Nurul Hasfira, Nurul Lyla Ramadhani, dan Nurul Asifa yang tidak henti-hentinya mencurahkan do'a, kasih sayang serta motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
10. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu dengan rela membantu penulis baik secara moril maupun secara materil.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuanya, tiada yang dapat penulis persembahkan selain do'a, semoga amal perbuatan yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah dan pahala disisi Allah swt. dengan rendah hati penulis memohon maaf, sekaligus akan berusaha untuk memperbaiki jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan, baik secara substansi maupun secara metodologis.

Makassar, November 2017
Penulis,

NURUL HAZANAH
NIM. 10300113049

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Gadai	14
1. Etimologi	14
2. Terminologi	14
B. Dasar Hukum Gadai	14
C. Gadai Dilihat Dari Berbagai Aspek	19
D. Mekanisme Pembahasan Gadai Perspektif Hukum Islam	23
E. Pemanfaatan Barang Gadai	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Sumber Data.....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	42
E. Instrumen Penelitian.....	43
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	44

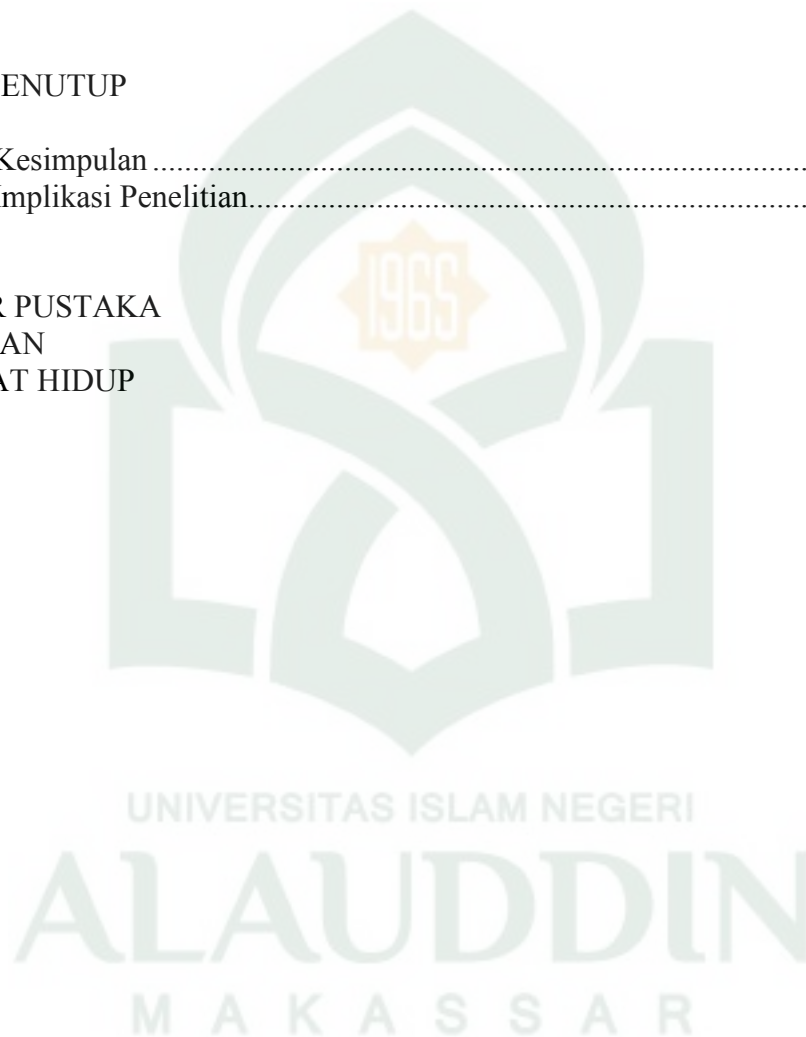
BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba ...	46
B. Praktek Pelaksanaan <i>Mappasanra</i> Tanah Sawah di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.....	54
C. Praktek Pelaksanaan Mappasanrra Tanah Menurut Hukum Islam	57
D. Analisis Pemanfaatan Barang Gadai di Tinjau dari Segi masalah dan mudharatnya.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Implikasi Penelitian.....	61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Jarak Waktu Tempuh Dari Desa Ke Kota.....	37
Tabel 4.2 : Batas Desa.....	38
Tabel 4.3 : Luas Wilayah Desa Menurut Keterangan	38
Tabel 4.4 : Wilayah Menurut penggunaan.....	38



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

ا	<i>Dammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
أُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... آ...	Fathah dan alif atau yaa'	A	a dan garis diatas
إِ	Kasrah dan yaa'	I	I dan garis diatas
أُ	Dhammah dan waw	U	u dan garis diatas

Contoh:

مات : *maata*
 رَمَى : *ramaa*
 قِيلَ : *qiila*
 يَمُوتُ : *yamuutu*

4. *Taa' marbuutah*

Transliterasi untuk *taa' marbuutah* ada dua, yaitu *taa' marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakatfathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الْأَطْفَالِ الرَّوْضَةُ : *raudah al- atfal*
 الْقَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*
 نَجَّيْنَا : *najjainaa*
 الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعَم : *nu''ima*

عَدُو : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi (i).

Contoh :

عَلِي : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruuna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Conto: *Fizilaal Al-Qur'an*

Al-Sunnahqabl al-tadwin

9. Lafz al- Jalaalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh : دِيْنُاللهِ *diinu'lah* يَاالله *billaah*

Adapun taamarbuutah diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh : *hum fi rahmatillaah*

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa ma muhammadunillaarasul*

Inna awwalabaitinwudi' alinnasilallazii bi bakkatamubarakan

Syahruramadan al-laziiunzilafih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu Al-Wafid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

Swt.	= <i>subhanallahuwata'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihiwasallam</i>
r.a	= <i>radiallahu 'anhu</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS.../...4	= QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama :Nurul Hazanah

Nim :10300113049

Judul :Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Mappasanra Tanah Sawah

(Studi kasus Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktek *mappasanra* tanah sawah di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek *mappasanra* tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba? 3) Bagaimana analisis pemanfaatan *mappasanra* ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemudharatannya?.

Metode dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1) Pelaksanaan gadai tanah (sawah) di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dilakukan sejak dahulu. 2) Jika dilihat dari pandangan Hukum Islam sudah sah dan sesuai dengan ketentuan karena dilihat secara keseluruhan analisis akad gadai tanah sawah telah sah dan sesuai menurut hukum Islam hanya saja dalam serah terima *marhun* tidak sempurna karena *rahin* tidak menunjukkan sertifikat tanahnya, sedangkan menurut ketentuan harus menyerahkan sertifikat tanah sebagai bukti otentik karena sawah termasuk kategori benda tidak bergerak.. 3) Analisis pemanfaatan *passanra* bisa mendatangkan kemaslahatan untuk orang yang menggadai (rahin), pemberi utang (murtahin), dan masyarakat, karena dapat menutupi juga dapat keuntungan jika berniat baik dan termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, juga dapat menimbulkan kemudharatan ketika fungsi dari barang gadai sebagai barang jaminan dan kepercayaan tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Hendaklah para pemuka masyarakat dalam hal ini adalah para ulama setempat, agar sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai pelaksanaan sanrra (gadai) yang sesuai dengan pandangan hukum Islam sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan. 2) Kepada rahin dan murtahin, selain kepercayaan yang mereka miliki bersama. Hendaknya dalam bertransaksi gadai tanah (sawah) menggunakan catatan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak di bawah notaris sebagai bukti otentik jika diantara mereka terjadi perselisihan. 3)Hendaknya dalam berinteraksi gadai tanah (sawah) selain melibatkan pihak ketiga (saksi) juga melibatkan pihak pemerintah seperti kepala Desa dan mengarsipkannya. Agar di kemudian hari, apabila terjadi perselisihan mudah dalam menyelesaikannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman. Keabadian dan kekuatan Islam telah terbukti sepanjang sejarahnya, dimana setiap kurung waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Qur'an sebagai landasannya. Keuniversalan konsep Islam merupakan jawaban terhadap keterbatasan manusia dalam berfikir.

Dalam menjawab permasalahan yang timbul nampaknya peran hukum Islam dalam konteks kekinian dan kemoderenan dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat dihindarkan lagi. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta memberikan kemaslahatan bagi umatnya. Di dalam hidup ini terkadang orang mengalami kesulitan untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain. Meskipun untuk memperoleh pinjaman itu harus disertai jaminan (koleteral). Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah/2:283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang^[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹

Agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya tolong-menolong. Bentuk tolong menolong ini bisa berupa pemberian, pinjaman, utang-piutang. Dalam suatu perjanjian utang-piutang, debitur sebagai pihak yang berhutang. Agar kreditur memperoleh rasa aman dan terjamin terhadap uang yang dipinjamkan, kreditur masyarakat sebagai agunan atau jaminan. Agunan ini di antaranya bisa berupa gadai atau barang-barang yang dimiliki oleh debitur. Debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan barang-barang yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau penerima gadai.

Gadai dalam fikih Islam disebut *Ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyendera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.²

Gadai secara bahasa adalah tetap, kekal atau jaminan. Sedangkan secara istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1150 kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai atas suatu barang

¹Kementrian Agama RI, *AL-Qura'an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi Az-Zukhruf* (Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 49.

²Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1-2;

bergerak tersebut diserahkan kepada yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama yang berpiutang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hokum perundang-undangan disebut barang jaminan dan anggunan. Sedangkan hukum gadai (*rahn*) dalam hukum Islam adalah *syara'* sebagai jaminan utang dari barang tersebut.³

Selain pengertian di atas ada beberapa pengertian gadai (*rahn*) menurut beberapa ahli hukum Islam sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iyah

Gadai yaitu menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.⁴

2. Ulama Malikiyah

Gadai yaitu sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya dan diambil pengikat atas utang yang tetap (mengikat).⁵

3. Ulama Hanabilah

Gadai merupakan suatu benda yang dijadikan kepercayaan utang, untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tak sanggup membayar utangnya.⁶

4. Ahmad Azhar Basyir

Gadai (*rahn*) adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterimanya.⁷

³Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, h. 5.

⁴Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 188.

⁵Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, h. 192.

⁶Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, h. 190

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Utang-Piutang Gadai* (Cet. II; Bandung: Al- Ma'arif, 1994), h. 33.

5. Muhammad Syafi'i Antonio

Gadai Syariah (*rahn*) menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomi, dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁸

Pengertian gadai yang tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata dan Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW. Menurut pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan barang piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Pengertian gadai yang tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.⁹

Peranan dari lembaga keuangan dari kegiatan gadai ini adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang

⁸Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), h. 217.

⁹Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 33-34.

sedang memerlukan pinjaman ataupun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti lintah darat untuk mendapatkan sewa dana atau bunga dengan tingkat bunga yang tinggi. Kemudian dengan gadai, akan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah dimana mereka dapat menggunakan uang dari gadai untuk keperluan pendanaan modal kerja, dan melaksanakan serta menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.¹⁰

Bentuk perjanjian gadai dalam KUHPdata tidak diwajibkan dalam bentuk tertulis, jadi dapat diadakan dengan lisan. Ini dapat disimpulkan dari pasal 1151 KUHPdata yang mengatakan bahwa perjanjian gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan sebagai perjanjian pokok.¹¹

Hak gadai kreditur belum terbentuk dengan adanya gadai, tetapi baru terbentuk bila perjanjian gadai itu diikuti oleh penyerahan barang gadai kepada kreditur atau kepada seorang ketiga yang telah disetujui bersama oleh kreditur-kreditur (Pasal 1152 ayat (1) KUHPdata) yang lebih dipertegas dalam pasal 1152 ayat (2) KUHPdata bahwa:

Tidaklah sah gadai atas benda yang diberikan tetap dalam kekuasaan debitur atau pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan kreditur.¹²

Dalam konteks pengertian benda objek gadai, *hukum adat Indonesia* (yang masih berlaku sebagai *hukum positif*) memiliki pengertian yang menyimpang dari pengertian gadai di atas: Di samping barang-barang bergerak, gadai dapat juga diberikan atas *tanah* dengan atau tanpa segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut. Penetapan hak gadai atas benda-benda bergerak dan piutang-piutang dilakukan dengan cara membawa barang gadainya ke bawah kekuasaan si

¹⁰Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, h. 10.

¹¹Istiqamah, *Hukum Waris dan Benda* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 162.

¹²*Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang Undang Hukum Perdata –terjemahan* (Permata Press, 2010), h. 264.

berpiutang atau pihak ketiga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Penetapan inilah yang membedakan lembaga gadai dan lembaga hipotek, hak tanggungan, ataupun fidusia. Ketentuan untuk menyerahkan barang gadai dalam kekuasaan kreditor pemegang gadai atau pihak ketiga merupakan unsur mutlak dari suatu gadai, sehingga menjadikan *hukum memaksa (mandatory rule)*. Apabila unsur ini tidak ada, maka gadai dianggap tidak ada sehingga oleh undang-undang gadai dianggap batal (*null and void*) demi hukum.¹³

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai. Di dalam surat bukti surat kredit (SBK) telah ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuhnya tempo atau pengembalian kredit. Di samping itu, di dalam surat bukti kredit telah ditentukan syarat, yaitu: jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan.¹⁴

Di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, ada cara gadai yang disebut *mappasanra*. Banyak terjadi di Desa itu, bahwa sawah yang dijadikan barang jaminan gadai langsung dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya di manfaatkan oleh penerima gadai atau sawah yang dijadikan barang gadai tersebut dikelola oleh penggadai namun hasil atau panen dari sawah tersebut dibagi dengan penerima gadai sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Pada dasarnya, pemilik barang dapat mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Kendati pemilik barang (jaminan) boleh memanfaatkan

¹³Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 152.

¹⁴Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 51-52.

hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan, atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari penerima gadai.

Oleh karena itu apakah sudah benar, menurut hukum Islam pelaksanaan *mappasanra* tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba?. Mereka memiliki keterbatasan informasi tentang gadai atau *rahn*, yang seharusnya mereka pahami sebelum mereka melakukan transaksi *mappasanra* itu.

Sebagai masyarakat di desa tersebut *mappasanra* secara perorangan. Kebanyakan dari mereka melakukan *mappasanra* dengan jaminan sawah yang masih produktif. Kebanyakan penerima gadai tidak menginginkan sawah yang dijadikan jaminan *mappasanra* itu non produktif. Maka uraian diatas penulis menegaskan yang akan dijadikan bahan penelitian skripsi ini adalah: “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *MAPPASANRA* TANAH SAWAH.(Studi Kasus di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan pokok masalah penelitian yaitu bagaimana eksistensi *mappasanra* tanah sawah masyarakat di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba perspektif hukum Islam?. Berdasarkan rumusan pokok masalah tersebut dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *mappasanra* tanah sawah di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek *mappasanra* tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba?
3. Bagaimana Analisis pemanfaatan *mappasanra* ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemudharatannya?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan keluar dari pokok permasalahan, oleh karena itu penelitian difokuskan di masyarakat Desa Singa dan bagaimana pandangan atau analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan praktek dan apa saja unsur dan penyebab terjadinya pelaksanaan *mappasanra* tanah sawah yang dilakukan di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

2. Deskripsi Fokus

Orientasi penelitian ini dibatasi pada analisis hukum Islam terhadap praktek *mappasanra* tanah sawah di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Hal tersebut dibatasi untuk menghindari pembahasan yang meluas dan tidak relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka dikemukakan beberapa pengertian terhadap kata yang dianggap perlu.

a. *Mappasanra* (gadai) sesuatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya yang berutang atau oleh orang seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya.

b. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang menjadi bagian dari agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah yaitu (1) hukum, (2) hukum dan ahkam, (3) syariah atau syariat, (4) fiqh atau fiqh.

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literature yang dijadikan acuan dasar, antara lain:

1. Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Gadai Syariah*" dalam buku ini dijelaskan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi pemilik si peminjam (*rahn*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.¹⁵ Dalam buku ini menjelaskan bagaimana jika seseorang melakukan gadai tetapi tidak menjelaskan secara rinci barang gadai apa yang dimaksudkan.
2. Ade Sofyan Mulazid dalam bukunya "*Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*" dalam buku ini dijelaskan bahwa pro-kontra tentang pemanfaatan barang jaminan "*al-infita' bi al-marhun*" secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga pandangan: (a) membolehkan; (b) melarang; (c) adanya persyaratan tertentu. Akan tetapi buku ini hanya membahas sistem kedudukan pegadaian syariah dan hanya membahas secara umum bagaimana sistem pemanfaatan barang gadai.

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 3.

3. Istiqamah dalam bukunya yang berjudul *Hukum Waris dan Benda* yang memuat persoalan gadai diantaranya yaitu fungsi gadai dan objek gadai yang dimana membahas tentang Suatu pinjaman uang sudah dijamin pelunasannya oleh pasal 1131 KUHPerdara, sebab pasal ini mengatur bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi tanggungan atau jaminan untuk segala utang-utangnya. Dan yang dapat menjadi obyek gadai adalah: Benda yang bergerak bertubuh (arloji, perhiasan emas, motor, televisi). Benda bergerak yang tidak bertubuh yang dimaksud ialah berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang.
4. Sulaeman Rasjid dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Islam*" yang salah satu babnya memuat tentang utang-piutang dan gadai. Buku ini menjelaskan bahwa apabila kita ingin melakukan gadai maka harus ada barang jaminan sebagai tanggungan utangnya.¹⁶ Namun buku ini tidak membahas secara spesifik syarat dan unsur dalam melakukan proses bergadai.
5. Salim HS, dalam bukunya yang berjudul "*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia tentang hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima gadai*". Buku ini memuat tentang terjadinya perjanjian gadai antara pemberi dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam Pasal 1155 KUHPerdara telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, seperti misalnya pemberi gadai tidak membayar pokok pinjaman dan sewa modalnya, maka lembaga pegadaian dapat memberi somasi kepada pemberi gadai agar dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan.¹⁷

¹⁶Sulaeman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Al.Gensido, 2003), h. 310.

¹⁷Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 47-49.

6. Sudaryo Soimin. Dalam bukunya yang berjudul “*Status dan Pembebasan Tanah*” yang didalamnya memuat tentang hak pengelolaan tidak dapat dijual, sedangkan mengenai hak gadai sampai saat ini dalam praktik belum terdaftar, maka jual beli yang obyeknya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Negara, yang harus dilakukan akta dibawah tangan, asal para pihak menyetujuinya.¹⁸ Dalam buku ini hanya membahas tentang hak pengelolaan tidak membahas secara lebih jauh lagi cara pengelolaan dan apakah hak yang dikelolah itu dapat dijual atau tidak.
7. Munir Fuady, dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Jaminan Utang*” yang membahas tentang perbedaan antara gadai dan hak tanggungan terletak pada objek jaminannya. Objek hak tanggungan adalah benda tidak bergerak (tanah). Dalam sistem hukum adat yang masih berlaku dan masih banyak dipraktekkan di pedesaan, tanah pun dapat digadaikan di samping barang bergerak ini disebut dengan gadai tanah. Dalam gadai tanah, tanah objek gadai juga harus dialihkan kekuasaannya kepada kreditor.¹⁹

Dari beberapa penjelasan kajian pustaka di atas belum ada yang membahas tentang bagaimana analisis pandangan hukum Islam dalam praktek gadai tanah sawah. Meskipun dari tujuh sumber tersebut telah ada yang membahas tentang sistem dan praktek gadai, tetapi belum ada yang membahas secara rinci masalah yang akan diteliti. Oleh sebab itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut dan pengetahuan secara mendalam tentang penelitian tersebut.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

¹⁸Sudaryo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 99.

¹⁹Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, h. 153-154-155.

- a. Untuk mendeskripsikan praktek gadai tanah sawah di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.
- b. Untuk menjelaskan status hukum gadai yang terjadi di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba
- c. Untuk mengetahui analisis pemanfaatan *mappasanra* yang ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemudharatannya.

2. Kegunaan

- a. Diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu di bidang Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, khususnya dalam penyelesaian permasalahan praktek gadai tanah sawah.
- b. Diharapkan dapat menjadi pencerah bagi masyarakat di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba yang ingin melakukan praktek *mappasanrra* tanah sawah.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Gadai

1. Etimologi

Secara etimologi, kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runguhan. Dalam islam *ar-rahn* merupakan sarana tolong menolong bagi umat islam, tanpa ada imbalan jasa.

2. Terminology

Secara terminologi, gadai dalam Islam (*rahn*) sebagaimana di definisikan oleh para ulama adalah menjadikan barang berharga menurut tinjauan syariat sebagai jaminan utang, sekiranya pembayaran utang atau sebagian bisa di ambil dari benda yang digadaikan tersebut. Apabila seorang berutang kepada orang lain, kemudian ia memberikan kepada pemberi utang sebuah jaminan seperti bangunan atau binatang ternak, jaminan tersebut terus tertahan di tangan si pemberi utang hingga utangnya selesai di bayar. *Rahn* seperti ini diperbolehkan dalam Islam.

B. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktek hutang piutang dengan jaminan (gadai), antara lain terdapat dalam Al Quran, Ijma' Ulama dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Qs. Al Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ رَاءِثٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹

Pengertian yang dapat diambil dari ayat diatas adalah Allah memerintahkan pada seseorang yang mengadakan perjanjian utang-piutang dengan orang lain yang tidak (mampu) menulis sendiri, maka hendaknya orang yang berhutang memberikan sesuatu barang yang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan atas hutangnya. Hal ini dapat dimaksudkan agar orang yang menghutangkan tidak akan mengalami kerugian. Pada ayat diatas disebutkan, menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan utangnya tersebut. Hal itu untuk menanamkan rasa percaya, karena dalam perjalanan tidak akan mendapatkan seorang penulis yang akan mencatat perjanjian tersebut. Dengan demikian menurut pendapat di atas, yang menjadi syarat sahnya perjanjian hutang piutang baik dalam perjalanan maupun keadaan mukim adalah adanya suatu barang yang bernilai menurut pandangan syara' yang dijadikan sebagai jaminan hutang.²

Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Alquran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang

¹Kementrian Agama RI, *AL-Qura'an dan Terjemahnya Edisi Translitrasi Az-Zukhruf*(Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 49.

²Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tafsir fi Zhilalih Quran di Bawah Naungan Al Quran* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 301.

hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).³

Selain itu, Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika kedua belah pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi demikian harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan ‘Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan mnghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi dari peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang.⁴

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu. Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap atau bermukim. Sebab keadaan musafir atau

³Fadilah Asy-Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam* (Cet. I; Damaskus: Mahkatab Al-Ghazali, 1986), h. 175.

⁴Fadilah Asy-Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, h. 176.

menetap bukanlah suatu persyaratan keabsahan transaksi *rahn*. Apalagi, terdapat sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.⁵

2. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Ali bin Khasyram keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan)."

yang bercerita tentang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw, tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih dari sikap Nabi Muhammad saw, yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan Nabi Muhammad saw, kepada mereka.⁶

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 5-6.

⁶Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 6 (Cet. IV; Beirut : Dar Al-Fikr, 2002), h. 4210.

Ijtihad yang berkaitan dengan praktek hutang-piutang dengan jaminan gadai seperti timbulnya persoalan tentang adanya siapa yang menanggung biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) selama berada pada pihak yang memberi piutang (*murtahin*). Oleh karena itu, para *fuqoha'* berusaha merumuskan ketentuan-ketentuan dalam hutang-ptang dengan jaminan gadai tanpa keluar dari aturan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak yang melibatkan dirinya pada perjanjian hutang-piutang dengan jaminan gadai tidak saling merugikan atau terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kemudharatan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian utang-piutang itu merupakan hasil ijtihad para fuqoha', antara lain rukun dan syarat-syarat dalam perjanjian hutang-piutang dengan jaminan gadai.⁷

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya di kemukakan sebagai berikut:

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 25/DSN MUI/III/2002, tentang Rahn;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 26/DSN MUI/III/2002, tentang Rahn Emas;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 09/DSN MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 10/DSN MUI/IV/2000, tentang Wakalah;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 43/DSNMUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.

⁷Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut, Dal Al-Fikr Al-Ilmiyah), h. 787.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a. Pasal 1150, yang berisi:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.⁸

2. Pasal 1151, yang berisi:

“Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya”.⁹

C. Gadai Dilihat Dari Berbagai Aspek

1. Aspek Legalitas

Pendirian pegadaian syariah secara yuridis empiris seperti yang telah diuraikan dilatarbelakangi oleh keinginan warga masyarakat Islam yang menghendaki adanya lembaga pegadaian yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan pegadaian syariah di maksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat golongan sosial ekonomi lemah (kecil), yang secara kelembagaan dalam pengelolaan menerapkan manajemen modern, yaitu menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan etos hemat dalam penyaluran pinjaman. Karena itu, kalau pegadaian syariah di bawah lindungan Perum Pegadaian

⁸Tim Visi Yustisia, KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) (Jakarta: Visimedia, 2015), h.307.

⁹Tim Visi Yustisia, KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata), h.308

mengusung moto, “*mengatasi masalah sesuai syariah*”, sebagai akibat semakin populernya wacana ekonomi syariah yang menjadi latar belakang yang turut mendorong lahirnya lembaga pegadaian syariah, yaitu turut mendorong bergairahnya pasar dan praktisi lembaga keuangan syariah secara umum. Karena itu, ada beberapa aspek penting yang menjadi kajian dalam pendirian pegadaian syariah di lingkungan Perum Pegadaian, antara lain sebagai berikut.

Selain yuridis empiris telah diuraikan di atas tentang keberadaan pegadaian syariah, maka secara yuridis normatif didasari oleh lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sehingga lembaga keuangan syariah beroperasi di Indonesia. Apabila memperhatikan pola pikir Umar Chapra, lembaga keuangan syariah dimaksud cakupannya tidak hanya terbatas pada dunia perbankan, tetapi mencakup pula institusi keuangan nonbank lainnya, seperti pegadaian, asuransi, institusi kredit khusus korporasi atau korporasi audit investasi. Selain itu, ekspansi Perum Pegadaian kepada sektor pegadaian syariah dimungkinkan setelah status hukum berubah dari Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Perusahaan Umum (Perum). Perubahan status ini diatur oleh PP No. 10 tahun 1999. Pasal 3 ayat (1a). Peraturan Pemerintah dimaksud berbunyi: “Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai”.

Keabsahan praktek gadai syariah yang dijalankan oleh Perum Pegadaian lebih mendapat legitimasi setelah memperhatikan bunyi Pasal 5 ayat (2b) dari PP dimaksud, yaitu menyebut Perum Pegadaian adalah perusahaan gadai yang mempunyai misi melakukan “pencegahan praktek ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya”. Selain itu, tujuan Perum Pegadaian dipertegas oleh PP No. 103 tahun 2000, yang menyatakan bahwa pegadaian ditunjuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah kebawah.

Berdasarkan legislasi di atas, hingga saat ini menjadi kekuatan atau dasar hukum yang mengikat bagi beroperasinya badan pegadaian syariah, termasuk pendirian cabang-cabang pegadaian syariah di bawah payung hukum "Perum Pegadaian". Selain itu, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dijadikan acuan dalam menjalankan praktik gadai sesuai syariah, yakni fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* (gadai), yang disahkan pada 26 Juni 2002; kemudian, fatwa No. 26/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas (gadai emas).¹⁰

2. Aspek Permodalan

Untuk menjalankan perusahaan gadai syariah membutuhkan modal yang besar untuk pemberian dana pinjaman kepada nasabah dan biaya investasi penyimpanan barang gadai. Demikian juga biaya operasional sehari-hari pegadaian itu sendiri. Aspek permodalan mudah didapatkan bila sebuah perusahaan berbentuk perseroan terbatas, yaitu dana bisa didapatkan dari penjualan saham yang dilakukan di pasar bursa. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan Perum Pegadaian yang mempunyai status sebagai perusahaan umum (Perum), Perum Pegadaian terikat dengan ketentuan legislasi mengenai perusahaan umum sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah binaan Kementerian BUMN dan Departemen Keuangan sehingga pendanaan didapatkan dari kegiatan penjualan saham.

Perum Pegadaian pada awalnya mendapat modal dari pemerintah yang selanjutnya dalam pengelolaan gadai syariah mendapat modal dari kerja sama yang dilakukan dengan pihak Bank Muamalat Indonesia (selanjutnya disebut BMI). Namun, perkembangan terakhir suntikan dana dari BMI terbentur oleh aturan Batas Minimum Penyaluran Kredit (BMPK), sehingga saat ini Perum

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 54-55.

Pegadaian mengandalkan pendanaan dari sewa modal (untuk gadai konvensional), sewa gedung, dan sumber dana lainnya. Untuk pegadaian syariah, perolehan dana didapatkan dari biaya administrasi (*qardh al-hasan*), jasa penyimpanan (*ijarah*), jasa taksiran, galeri (penjualan emas), baik dari bagi hasil atau *profil loss sharing* (PLS) dari skim *rahn*, *mudharabah*, *ba'i muqayyadah*, maupun *musyarakah*. Saat ini, *musyarakah* dilakukan oleh Perum Pegadaian beraliansi dengan Bank Syariah Mandiri untuk jasa penyimpanan dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati antara pihak *rahin* dengan pihak *murtahin*.

3. Aspek Sumber Daya Insani

Keberlangsungan usaha gadai syariah dilakukan oleh Perum Pegadaian sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya insani yang mengoperasikannya, terutama dalam melakukan penaksiran atas barang gadai, juga kemampuan analisis mengenai investasi yang dapat mendatangkan hasil yang baik. Untuk itu, sumber daya insani yang mampu dalam hal penaksiran dan analisis kekayaan usaha amat dibutuhkan oleh usaha gadai syariah dalam Perum Pegadaian.

4. Aspek Kelembagaan

Secara kelembagaan, gadai syariah dijalankan oleh Perum Pegadaian yang mengemban misi syiar Islam. Dalam hal ini, praktek gadai yang dilakukan semaksimal mungkin menghindari praktik bisnis yang mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan operasional yang diberlakukan dalam praktek gadai syariah dikonsultasikan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang juga badan pengawas dalam lingkungan Bank Muamalat Indonesia.

5. Aspek Sistem dan Prosedur

Pelaksanaan sistem dan prosedur dalam pelaksanaan gadai syariah di Perum Pegadaian adalah sistem lembaga keuangan modern, yang mengutamakan

efisiensi dan efektivitas dalam berbisnis. Karena itu, semua sistem dan prosedur yang dijalankan oleh pegadaian syariah bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam mengakses perjanjian utang-piutang dengan pihak cabang pegadaian syariah yang ada di seluruh Indonesia.¹¹

D. Mekanisme Pembahasan Gadai Perspektif Hukum Islam

1. Rukun Gadai

Dalam fiqih empat mazhab (*fiqh al-mazhahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

- a. *Aqid* ialah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan *murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal yang dimaksud didasari oleh *sighat*, yaitu berupa ucapan ijab qabul (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai).
- b. *Ma'qud alaih* meliputi dua hal, yaitu *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih (dain)*, atau utang yang karenanya diadakan akad rahn.¹²

Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya *shighat* sebagai rujukan dari terjadinya *rahn*. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *shighat* tidak termasuk rukun *rahn*, melainkan *ijab* (pertanyaan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan *qabul* (pertanyaan kesediaan dan memberi utang, dan menerima barang agunan tersebut).

Di samping itu, menurut Ulama Hanafi, untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn*, masih diperlukan apa yang disebut penguasaan barang oleh kreditor (*al-qabadh*), sementara kedua pihak yang melaksanakan akad, dan harta yang dijadikan agunan atau jaminan, dalam pandangan ulama Hanafi lebih tepat

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Pegadaian Syariah*, h. 56-57.

¹²Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid* (tp : Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, tt), h. 205.

dimasukkan sebagai syarat *rahn* bukan rukun *rahn*. Menyangkut hal ini, penulis lebih sepakat pada pendapat pertama, yang mengatakan bahwa 3 (tiga) hal terpenting dalam perjanjian *rahn* dan *aqid, ma'qud 'alaih*; dan *shighat* dari akad, yang berupa *ijab qabul* antara 2 (dua) orang yang berakad. Karena itu, syarat *shighat* menurut mazhab Hanafi adalah ia tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal meski akadnya tetap sah. Misalnya, debitur mensyaratkan perihal tenggang waktu pelunasan utang, dan manakala tenggang waktunya habis, sedangkan utangnya belum dilunasi maka *rahn* diperpanjang satu bulan. Demikian juga kreditor mensyaratkan barang agunan untuk dapat dimanfaatkannya.

2. Syarat-Syarat Gadai

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Antara lain:

a) Shighat

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

b) Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahn* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Menurut sebagian pengikut ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang *mumayyiz*

untuk melakukan akad karena dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Syarat orang yang menggadaikan (*ar-rahin*) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum. Lain halnya menurut mayoritas ulama, orang yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang telah *baligh* dan berakal; sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, melainkan cukup berakal saja. Karena itu, menurut mazhab Hanafi, anak kecil yang *mumayyiz*, yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, maka ia dapat melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan mendapat persetujuan dari walinya.

c) Utang (*Marhun Bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa : (1) Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (2) merupakan barang yang dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (3) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d) Marhun

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya adalah:

1. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam;
2. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utangnya;
3. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
4. Agunan itu milik sah debitur;

5. Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya);
6. Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat;
7. Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.¹³

Barang yang digadaikan, aturan pokok dalam madzhab Maliki tentang masalah ini adalah gadai dapat dilakukan pada semua harga, pada berbagai macam jual beli, kecuali jual beli mata uang asing (sharf) dan pokok modal. Dapat disimpulkan bahwa barang yang akan digadaikan harus jelas dan bisa diserahkan setelah terjadi kesepakatan antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).¹⁴

Menurut golongan Malikiyah mengemukakan bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam praktek gadai antara lain :

- a) Syarat yang berhubungan dengan kedua belah pihak yang melakukan akad (*rahin* dan *murtahin*), perjanjian hutang piutang dengan perjanjian hutang dianggap sah jika subjeknya memenuhi syarat yang sesuai dengan tindakan hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Setiap orang mampu melakukan akad jual beli secara sah dan benar, transaksi akan dianggap sah apabila dalam perjanjian hutang piutang terdapat barang jaminan (gadai), oleh karena itu syarat yang berlaku dalam jual beli sama dengan syarat-syarat yang terjadi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai). Syarat-syarat hutang piutang dengan jaminan (gadai) adalah mumayyiz dan berakal sehat. Anak kecil yang belum mumayyiz ataupun orang yang lemah akalnya,

¹³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), h. 21.

¹⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman, dkk., Juz 3 (Semarang, Asy-Syiyfa, 1990), h. 304-306.

apabila akan melakukan perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) maka harus sepengetahuan walinya.

- b) Syarat-syarat yang berhubungan dengan jaminan (*marhun*) syarat barang yang boleh dijadikan jaminan hutang, seperti dalam transaksi jual beli antara lain barang yang boleh (sah) dijadikan objek jual beli, diperbolehkan juga sebagai jaminan hutang piutang dengan jaminan (gadai), begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan memberikan jaminan hutang dalam wujud barang najis seperti anjing, babi, dan lain-lain. Dan juga tidak diperbolehkan menjadikan barang jaminan yang belum jelas wujudnya seperti anak binatang yang masih dalam kandungan induknya, buah-buahan yang belum masak (belum jelas hasilnya).
- c) Syarat-syarat yang berhubungan dengan hutang-piutang dan jaminan, hutang disyaratkan sesudah jelas dan tetap, baik hutang tersebut dilakukan atau diberikan seketika ataupun pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, hutang dianggap sah apabila seorang mengadakan akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan pada mengupahnya (*al-ju'lu*) yang pemberian upah dari seseorang kepada orang lain atas jasa yang diberikan.
- d) Syarat yang berhubungan dengan transaksi (*akad*) akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan (*gadai*) tidak ditetapkan suatu syarat yang bertentangan dengan tujuan akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan (*gadai*) itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan (*gadai*) menghendaki apabila barang jaminan telah diberikan kepada pihak pemberi hutang tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang jaminan harus dijual. Kemudian jika pihak penerima hutang mensyaratkan barang jaminan tersebut tidak berada di tangan pemberi hutang atau apabila hutang tidak dilunasi maka barang jaminan tidak boleh dijual dan syarat seperti ini akan

bertentangan dengan akad perjanjian hutang piutang dengan menggunakan jaminan (gadai) dan akan dianggap batal.¹⁵

Menurut golongan Hanafiah, syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian hutang-piutang dengan jaminan (gadai) ada tiga macam, yaitu:

- a. Syarat hutang-piutang dengan jaminan (gadai) yaitu suatu yang dijadikan jaminan dalam bentuk barang yang bernilai menurut syarat dan hutang benar-benar telah diterima oleh pihak yang berhutang dengan jaminan (gadai) sebagai ganti dari barang jaminan.
- b. Syarat sahnya diperbolehkan perjanjian hutang-piutang dengan jaminan (gadai) ada tiga macam yaitu:

Berkaitan dengan akad, ada dua macam, yaitu :

1. Hendaknya syarat tidak berkaitan dengan akad,
2. Tidak disandarkan pada waktu tertentu.

Berkaitan dengan jaminan (gadai) ada lima macam, yaitu :

1. Barang jaminan harus jelas (tertentu),
2. Barang jaminan berada dalam kekuasaan pihak pemberi piutang dengan jaminan (penerima) setelah ia terima,
3. Barang jaminan (gadai) terlepas dengan pihak *rahin* (pihak yang berhutang dengan jaminan),
4. Barang jaminan (gadai) bukan barang najis,
5. Barang jaminan (gadai) tidak termasuk barang yang tidak bisa diambil manfaatnya oleh umum (*mubahat amah*) yang tidak berkaitan dengan hak milik seseorang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad (*aqid*), yaitu berakal sehat.

¹⁵Abdurrahman Aljaziri, *Kitabul Fiqh fi Mazhabil Al-Arbaah* (Beirut, Dar Al Fikr), h. 320.

- c. Syarat tetapnya barang jaminan (gadai), yaitu barang jaminan hutang (gadai) telah diterima oleh pemberi piutang (penerima gadai) pihak yang berhutang dengan jaminan (*rahin*) masih diperbolehkan menarik atau mencabut kembali perjanjian hutang piutangnya (akad gadainya).¹⁶

Menurut golongan As-Syafi'iyah, syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) ada dua macam, yaitu :

- a. Syarat tetapnya barang jaminan (gadai), artinya barang jaminan telah diterima oleh pihak pemberi hutang (*murtahin*).

- b. Syarat sahnya perjanjian hutang dengan jaminan ada empat macam,¹⁷ yaitu :

1) Syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu hendaknya tidak dikaitkan dengan syarat yang dikehendaki oleh akad ketika jatuh tempo, karena dapat membatalkan perjanjian (akad gadai).

2) Syarat yang berkaitan dengan aqid (pihak yang mengadakan transaksi) yaitu *rahin* dan *murtahin* yang cakap berbuat hukum dan keduanya sudah baliqh serta berakal. Namun atas pertimbangan tertentu wali boleh mengadakan perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) terhadap harta anak yang dalam penguasaannya seperti :

- a. Dalam keadaan darurat yang sangat menghendaki dilakukan perjanjian hutang piutang dengan jaminan,
- b. Pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan (gadai) mengandung kemaslahatan terhadap anak atau orang.

- 3) Syarat yang berkaitan dengan barang jaminan hutang (*marhun*) antara lain :

¹⁶Abdurrahman Aljaziri, *Kitabul Fiqh fi Mazhabil Al-Arbaah* (Beirut, Dar Al Fikr), h. 324-328.

¹⁷Abdurrahman Aljaziri, *Kitabul Fiqh fi Mazhabil Al-Arbaah* (Beirut, Dar Al Fikr), h. 320.

- a. Pihak yang berhutang dengan jaminan (*rahin*) mempunyai hak kuasa atas barang yang dijadikan jaminan hutang (*marhun*),
 - b. Sesuatu yang dijadikan jaminan hutang berupa barang,
 - c. Barang yang dijadikan jaminan hutang (*marhun*) bukan barang yang cepat rusak, artinya barang tersebut dimungkinkan rusak setelah jatuh tempo,
 - d. Barang yang dijadikan sebagai barang jaminan hutang adalah barang suci,
 - e. Barang yang dijadikan barang jaminan hutang dapat diambil manfaatnya menurut syarat meskipun pada saat yang akan datang.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan hutang yang menjadi sebab diadakannya perjanjian hutang piutang dengan jaminan (*marhun bih*) ada empat macam, yaitu :
- a. Penyebab diadakannya akad gadai adalah hutang,
 - b. Hutang yang diterima pihak yang berhutang dengan jaminan sudah tetap,
 - c. Hutang itu tetap seketika atau yang akan datang oleh karenanya sah pada akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan sebab harga dalam masa khiyar,
 - d. Hutang itu telah diketahui berupa benda, jumlah, dan sifatnya.

Menurut golongan Hambaliyah, syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) ada dua macam, yaitu :

1. Syarat tetap (mengikat), yaitu barang yang dijadikan jaminan hutang telah diterima oleh pihak yang memberi piutang.
2. Syarat sahnya perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) terdapat empat macam, yaitu :
 - a. Syarat yang berkaitan dengan akad,
 - b. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang melakuakn akad,
 - c. Syarat yang berkaitan dengan barang jaminan hutang (*marhun*),

- d. Syarat yang berkaitan dengan hutang yang menyebabkan dilakukannya perjanjian hutang piutang dengan jaminan (*marhun bih*).¹⁸

Dari pendapat beberapa ulama diatas, pada dasarnya pendapat mereka memiliki kecenderungan yang sama artinya pendapat mereka tentang syarat-syarat perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) dan tentang syarat bagi aqid (*rahin dan murtahin*), marhun (barang jaminan), hutang (*marhun bih*), akad (*marhun alaih*). Akan tetapi diantara beberapa pendapat yang ada di atas, pendapat dari golongan As-Syafi'iyah-lah yang memberikan syarat-syarat perjanjian hutang piutang dengan jaminan yang lebih terperinci dan lebih sempurna.¹⁹

3. Status dan Jenis Barang Gadai

a. Status Barang Gadai

Ulama fikih menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (*murtahin/kreditor*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin/debitur*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *al-qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal ini dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengembalian jaminan. Maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. Hal itu, menunjukkan

¹⁸Abdurrahman Aljaziri, *Kitabul Fiqh fi Mazhabil Al-Arbaah*, h. 328 – 330.

¹⁹Abdurrahman Aljaziri, *Kitabul Fiqh fi Mazhabil Al-Arbaah*, h. 330 – 331.

bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata: “saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah”. Gadai tersebut sah, menurut pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi seperti yang dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonion. Karena itu, barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.²⁰

Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh (sah) dijualbelikan, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa utang, ketika utang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjikan). Beberapa utang adalah mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah menggadikan barang yang statusnya di-*ghashab* dan juga barang pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggungkan.

b. Jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang. Menurut ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori:

- 1) Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang di udara.
- 2) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan *syara'*, tidak sah menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- 4) Barang tersebut merupakan milik si *rahin*.

²⁰Muhammad Syafi’i Antonion, *Bank Syariah*, h. 214.

Menurut kesepakatan para ulama fikih, menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang yang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Abu Hanafi seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, yang mengatakan bahwa manfaat tidak termasuk dalam kategori harta. Alasannya, karena ketika akad dilakukan, manfaat belum berwujud.²¹

Selain hal-hal yang telah di paparkan di atas, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad *rahn*, di antaranya sebagai berikut:

a) *Akad Rahn adalah Akad Tabarru'*

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu akad *tabarru'* (kebajikan). Sebab, pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Berbeda dengan jual beli yang merupakan akad *mu'awadah* (pertukaran), di antara penjual dan pembeli yang melakukan pertukaran harta dengan barang, atau barang dengan barang. Akad-akad *tabarru'* dalam konsep *fikih mua'malah* meliputi akad *hibah*, *ji'alah* (pinjam-meminjam), *wadi'ah* (titipan), *qard*, dan *rahn*. Sebagai akad *tabarru'*, maka akad dimaksud mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.

b) *Hak dalam Gadai (Rahn) Bersifat Menyeluruh*

Mayoritas *fuqaha* berpendapat bahwa *rahn* berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seorang menggadaikan sejumlah barang tertentu keudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan itu melunasi utangnya. Alasannya, bahwa baran tersebut tertahan oleh sesuatu hak, dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian

²¹Zainuddin Ali, *Hukum Pegadaian Syariah*, h. 25-26.

dari hak tersebut. Namun, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa barang yang masih tetap berada di tangan *murtahin*, dalam kasus di atas hanya sebagiannya saja sebesar hak yang belum dilunasi oleh *rahin*. Golongan ini mengemukakan alasan bahwa keseluruhan barang gadai itu hanya tertahan oleh keseluruhan hak. Karena itu, sebagian barang tersebut tertahan oleh sebagian hak itu, dan ini serupa dengan tanggungan (*kafalah*).²²

c) *Musnahnya Barang Gadai*

Para ulama berselisih pendapat tentang siapa yang harus bertanggung jawab apabila barang gadai (*marhun*) musnah atau rusak di tangan penerima gadai. Imam Syafi'i, Ahmad Abu Saur, dan kebanyakan ulama hadis berpendapat, bahwa penerima gadai tidak bertanggung jawab atas musnahnya barang gadai. Lain halnya pendapat ulama mazhab Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama Kufah. Mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai itu merupakan jaminan utang sehingga barang tersebut musnah, maka kewajiban melunasi utang menjadi musnah juga.

d) *Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo*

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utang dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya. Mengenai penjualan barang gadai oleh wakil yang adil, para ulama menyepakati akan kebolehan. Namun, mereka berbeda pendapat bila yang menjual adalah *murtahin*. Menurut Abu Hanifah dan Imam

²²Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid*, (Ttp: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, tth), h. 207

Malik seperti yang dikutip oleh Ibnu Qudamah “Apabila dalam akad gadai diisyaratkan penjualan oleh penerima gadai setelah jatuh tempo, maka hal itu dibolehkan. Lain halnya pendapat dari kalangan mazhab Imam Syafi’i seperti yang dikutip oleh Ibnu Qudamah, yaitu *murtahin* tidak boleh menjual barang gadai (*marhun*) setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai hanya bisa dilakukan oleh wakil yang adil dan terpercaya. Argumentasi beliau ialah *rahin* menghendaki kesabaran terhadap barang yang akan dijual dan kecermatan terhadap harganya. Hal ini berbeda kondisi dengan *murthain* adalah barang tersebut cepat terjual yang kemudian menerima harganya.

e) *Pemeliharaan Barang Gadai*

Pemeliharaan dan penguasaan barang terhadap barang yang digadaikan pada garis besarnya sebagai syarat gadai, mengenai syarat yang diperselisihkan oleh para ulama adalah syarat sah gadai, penulis mengungkapkan pendapat ulama yang berbeda pendapat dimaksud, yaitu Imam Malik berpendapat bahwa di antara syarat sah gadai adalah kelangsungan penguasaan barang. Hal itu berarti pemberi barang gadai (*rahin*) belum menguasai barang gadai selama belum belunasi utangnya atau barang gadai kembali beralih kepada kekuasaan orang yang menggadaikan dengan jalan melunasi pinjaman (*ariyah*), dan penitipan barang: sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa kelangsungan penguasaan tidak menjadi syarat sahnya gadai. Namun demikian, para ulama sepakat bahwa biaya atas barang gadai itu menjadi kewajiban *rahin* yang menanggung resiko dan mendapatkan hasil dari barang gadai di maksud; tetapi para ulama tetap berbeda pendapat tentang biaya-biaya yang harus dipikul *rahin*, dan biaya yang dipikul *murtahin*.

Ulama Hanafiyah umumnya membagi biaya-biaya ini kepada *rahin* dan *murthain*. *Rahin* berkewajiban memikul biaya selayaknya sebagai pemilik

barang; sedangkan bagi *murtahin* berkewajiban memikul biaya sebagai pihak yang menjaga barang gadaian. Pembagian dimaksud, yaitu (a) *rahin* bertanggung jawab atas segala biaya yang diperlukan untuk menjaga kemaslahatan barang gadai dan kelangsungannya karena barang gadai merupakan barang miliknya; dan (b) *murtahin* bertanggung jawab atas segala biaya pengeluaran untuk menjaga atau memelihara barang gadai tersebut karena sebagai pihak penahan barang gadai dimaksud, berkaitan dengan kepentingannya. Berdasarkan pembagian tanggung jawab tersebut, merupakan tanggung jawab *rahin* untuk memberi makan, minum hewan gadai atau upah menggebalakannya, atau biaya menyiram tanaman (pengairan), penyerbukan, panen (pemetikan), dan menangani segala kemaslahatan tanaman, pajak, dan lain-lain. Karena itu, semua biaya-biaya dimaksud, untuk menjaga kelangsungan hidup barang gadai adalah pemilik (*rahin*) gadai, atau semua beban biaya untuk suatu barang dikembalikan kepada pemiliknya.

Lain halnya tanggung jawab bagi *murtahin*, yaitu biaya pemeliharaan, seperti untuk menjaga (satpam), atau tempat menyimpan barang gadai, sewa kandang hewan atau sewa gudang penyimpanan barang gadai, karena uang sewa adalah beban pemeliharaan sehingga menjadi tanggung jawab *murtahin*. Berdasarkan hal dimaksud, tidak boleh diisyaratkan pada akad gadai memberi upah kepada *murtahin* untuk pemeliharaan barang gadai karena hal itu sudah menjadi kewajibannya.²³

3. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

Hak penerima gadai (*murtahin*), antara lain :

²³Zainuddin Ali, *Hukum Pegadaian Syariah*, h. 29-30.

1. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
2. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
3. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut :

- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*rahin*)

Hak pemberi gadai antara lain:

1. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
3. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

4. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaian.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas, maka muncullah kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu :

- a) Pemberi gadai berhak melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaian, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

E. Pemanfaatan Barang Gadai

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).²⁴
2. Menurut ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan berikut :
 - a. Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta yang tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.

²⁴Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta : LSIK, 1997), h. 333.

- b. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.
 - c. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.
3. Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*). Lain halnya pendapat Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun sering orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan barang gadai tidak ubahnya qiradh, dan setiap bentuk qiradh yang mengalir manfaat adalah riba. Kecuali barang yang diagadaikan adalah hewan ternak yang bisa diambil susunya. Pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.²⁵
4. Menurut pendapat ulama Hanabilah, persyaratan bagi murtahin untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah:
- a) Ada izin dari pemilik barang,
 - b) Adanya gadai bukan karena mengutangkan.
- Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai khadam. Akan tetapi,

²⁵Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, h. 70-76.

apabila harta benda gadai itu berupa rumah, sawah, kebun dan sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.²⁶

Dari beberapa pendapat ulama yang diungkapkan di atas mempunyai dasar hukum yang sama. Namun mempunyai penafsiran yang berbeda-beda, oleh karena itu peneliti mempunyai pendapat yang lain, tetapi tetap menjadikan dasar hukum yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*) sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Namun, bila *rahin* ingin memanfaatkan *marhun* harus seiring *murtahin*. Dari hal tersebut dapat disimpulkan kekuasaan pemanfaatan *marhun* berada pada *murtahin* selama utang *rahin* belum dilunasi kepada *murtahin*. Pendapat peneliti tersebut menjadi kenyataan hukum dalam praktek pelaksanaan gadai pada umumnya baik gadai kendaraan bermotor, rumah, toko, empang, sawah maupun kebun maupun yang lainnya.

²⁶Chuzaimah T Yango dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Selain itu, juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba karena judul ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktik *mappasanra* tanah sawah.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu Teologis Normatif, Yuridis dan Sosiologis.

a. *Teologis Normatif* pada prinsipnya adalah pendekatan yang mengedepankan pemahaman kerangka keagamaan yang wujudnya di anggap benar.

b. *Yuridis* segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah.

c. *Sosiologis* adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep dan kaedah-kaedah yang terdapat dalam ilmu sosiologis.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sekunder

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik *mappasanrra* tanah sawah didukung oleh data-data kualitatif.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *library research* dengan jalan menelaah buku-buku, pertauran perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian ini karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.
2. Wawancara atau interview adalah pertemuan antara dua orang atau percakapan antara dua orang untuk mendapatkan informasi dan ide melalui pernyataan, dimana ada yang bertindak sebagai informan dan juga sebagai pewawancara. Wawancara dilakukan guna mendapatkan data secara langsung dari informan.
3. Dokumentasi
Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data-data dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi merupakan sumber data yang stabil dan menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung. Agar jelas dimana informasi di dapatkan maka peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data yang relevan dengan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam peneliti sendiri karena peneliti lebih mengetahui maksud dan tujuan penelitian ini dengan menggunakan:

1. Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara ini digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dan informasi yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku Catatan dan Alat Tulis
Alat ini digunakan untuk mencatat semua percakapan yang diperoleh dari sumber data.

3. Kamera

Alat ini digunakan untuk memotret oleh peneliti dalam melakukan wawancara terhadap informan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data

pengelolaan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode Pengelolaan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. *Identifikasi* data adalah pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi ini yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan fakta terkait dengan fakta praktik mappasanrra tanah sawah.
2. *Reduksi* data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh pra pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah.
3. *Editing* data yaitu pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.

b. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk mengurangi dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba

a. Letak Desa

Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupate Bulukumba. Desa Singa terletak di sebelah timur Kabupaten Bulukumba dan terdiri dari beberapa dusun yang jaraknya saling berdekatan. Jarak antar desa ke kota letaknya cukup jauh, sehingga termasuk dalam wilayah pedesaan. Berikut ini adalah jarak dari desa ke kota:

Tabel 4.1 Jarak Waktu Tempuh dari Desa ke Kota

No	Uraian	Jarak	Waktu Tempuh
1	Dari desa ke ibukota Kabupaten	30 km	45 menit
2	Dari desa ke ibukota Kecamatan	1,5 km	10 menit

Sumber: Kantor Desa Singa, Buku III Profil desa, Halaman 4 Orbitasi, 2015

b. Batas Desa

Desa Singa berbatasan dengan desa lainnya yang masih dalam satu kecamatan, adapun batas desa Singa, yaitu:

Tabel 4.2 Batas Desa

No	Batas	Desa/Kelurahan
1	Sebelah Timur	Desa Karassing
2	Sebelah Selatan	Kelurahan Tanuntung
3	Sebelah Barat	Desa Borong
4	Sebelah Utara	Desa Pataro

Sumber: Kantor Desa Singa, 2015

c. Luas Wilayah

Desa Singa memiliki luas wilayah desa menurut keterangan sekitar 1.256 Ha dan 955 Ha/M² luas wilayah menurut penggunaannya, yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

Tabel 4.3 Luas Wilayah Desa Menurut Keterangan

No	Uraian	Jumlah
1	Dusun Saukeng	311 Ha
2	Dusun Tuhulolo	272 Ha
3	Dusun Domenga	209 Ha
4	Dusun Lalokeng	228 Ha
5	Dusun Lombongan	236 Ha

Sumber: Kantor Desa Singa, Buku III Profil Desa, h. 2 Luas Wilayah Menurut Keterangan, 2015

Tabel 4.4 Wilayah Menurut Penggunaan

No	Uraian	Jumlah
1	Luas Pemukiman	59/90 Ha/M ²

2	Luas Persawahan	323,75 Ha/M ²
3	Luas Perkebunan	395,50 Ha/M ²
4	Luas Pemakaman	1,3 Ha/M ²
5	Luas Pekarangan	6,23 Ha/M ²
6	Luas Hutan Kemasyarakatan	14723 Ha/M ²
7	Luas Taman	- Ha/M ²
9	Luas Perkantoran	0,12 Ha/M ²
10	Luas Prasarana Umum	7,20 Ha/M ²

Sumber: Kantor Desa Singa, Buku III Profil Desa, h. 2, Luas Wilayah Menurut Penggunaan, 2005.

Desa Singa dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Muh. Satria DM dalam pemerintahannya kepala desa dibantu oleh 6 orang aparat pemerintah desa dengan jumlah 6 unit kerja, yakni sekretaris desa, seksi pemerintahan, seksi pembangunan, kepala pengurusan keuangan, dan kepala urusan umum.

B. Praktek Pelaksanaan Mappasanra Tanah Sawah di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

Gadai tanah (sawah) adalah perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan permufakatan bahwa si penggadai (rahin) akan berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa selama uang gadai belum dilunasi maka tanah (sawah) yang digadaikan

tetap dalam penguasaan si pemegang gadai (murtahin) dan selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak si pemegang gadai (murtahin).

Ibu Sukawati (rahin) mengungkapkan:

Karena digunakan untuk biaya sekolah, jadi kalau sudah butuh uang untuk membayar, dan masa panen belum tiba waktunya apalagi suami saya penghasilannya juga tidak banyak. Jadi terpaksa saya pasannya (gadaikan) itu sawah.¹

Masyarakat di Desa Singa pada umumnya bermata pencaharian di sektor pertanian, yang mana mereka mengandalkan musim padi dan musim jagung. Bila tiba musim panen mereka akan mendapatkan hasil. Dan hasil tersebut akan dipergunakannya untuk berjaga-jaga untuk keperluan nantinya, namun dalam keadaan mendesak seperti butuh biaya untuk sekolah anaknya, modal usaha, dan sebagainya, mereka terpaksa menggadaikan sawahnya. Sawah yang digadaikan tersebut adalah tanah milik mereka sendiri.

Masyarakat Desa Singa menyebut gadai dengan sebutan “Sanra” yaitu transaksi gadai tanah (sawah) sebagai jaminan dan tanah itu dimanfaatkan oleh penerima gadai. Orang yang melakukan gadai tersebut “appasanra” (pegadai/rahn), sedangkan yang menerima gadai “annyangrai” (penerima gadai/murtahin). Adapun mengenai batas waktu pelunasannya biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan dan tanpa batas waktu tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh murtahin sebagai berikut:

Bapak Tahir mengatakan:.....“batas waktu gadainya 5 tahun. Tapi kalau sudah sampai waktu 5 tahun lalu belum ada uangnya. Yaa... tetap berlanjut.”²

Ibu Sahorang Mengatakan: “tidak begitu, kita tidak pakai perjanjian, itu kalau pakai perjanjian baru pakai batas waktu. Nanti ada uangnya baru dibayar.”³

¹ Sukawati (35 tahun), Pihak penggadai (rahin), Masyarakat Desa Singa Bulukumba. *Wawancara*, Bulukumba 25 September 2017.

² Tahir (54 tahun), pemegang gadai (murtahin), Masyarakat Desa Singa Bulukumba. *Wawancara*, Bulukumba 26 September 2017.

Namun, apabila sudah sampai batas waktunya yang ditentukan, penggadai (rahin) belum mampu untuk membayar uang yang dipinjamnya maka penerima gadai (murtahin) berhak untuk tetap menahan, menggarap dan mengambil seluruhnya hasil dari tanah (sawah) tersebut. Adapun mengenai pelunasan tanpa batas waktu tertentu, asalkan uang sudah dikembalikan maka sawah yang di gadaikan pun kembali menjadi hak pemiliknya. Berdasarkan interview rata-rata yang terjadi jika sampai batas waktu atau jatuh tempo. Rahin (penggadai) belum mampu untuk membayar hutangnya, maka murtahin (penerima gadai) masih berhak atas sawah tersebut sampai si rahin melunasi pinjamannya.

Gadai tanah di Desa Singa Bulukumba dilakukan dengan cara perkiraan seberapa banyak uang yang akan dipinjam oleh si penggadai (rahin) serta tawar menawar antara si penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin). Dan apabila ada dalam akad tidak ditentukan batas waktunya maka gadai tersebut akan berakhir ketika rahin melunasi utangnya. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Sukawati:

Saya yang mendatangi rumahnya. Lalu saya langsung minta uang, baru saya gunakan sawahku untuk jaminan. Bilang 20 juta.... jadi uang separuh itu untuk sekolah anakku. Dia yang menentukan batas waktu karena saya tidak mau menentukan. Paling kalau adami uang kukasih keluarmi (dilunasi/berakhirnya gadai). Seandainya tidak ada waktu perjanjian ku kasih keluarmi. Tapi tiga tahunpi bisa di kasih keluar sesuai perjanjian. Jadi nanti tahun depan.⁴

Proses terjadinya akad gadai hanya dilakukan secara lisan dengan asumsi adanya saling percaya diantara kedua belah pihak. Selain itu terkadang dihadirkan pihak lain yang akan menjadi saksi.

³ Sahorang (52 tahun), pemegang gadai (murtahin) Masyarakat Desa Singa Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 26 September 2017.

⁴ Sukawati (35 tahun), pihak penggadai (rahin), Masyarakat Desa Singa Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba 25 September 2017.

Seperti yang telah dikemukakan tersebut bahwa alasan mereka untuk menggadaikan sawahnya adalah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak diantaranya biaya sekolah, modal usaha dan lain sebagainya.

Dari pihak murtahin ada 2 faktor yang menyebabkan mereka melakukan gadai yaitu:

1. faktor kebiasaan

Karean masyarakat di Desa Singa sudah terbiasa sejak jaman dahulu menggadaikan tanah, apabila ingin memenuhi kebutuhannya yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit selalu mengadakan gadai. Sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka sudah menjadi ketetapan umum bila seorang berhutang maka harus ada pegangan (jaminan). Dengan demikian pihak yang membutuhkan dana tersebut akan mendatangi orang-orang tertentu yang dianggap mampu menolongnya atau menyelesaikan masalahnya, seperti ungkapan yang diungkapkan oleh Ibu Sahorang (murtahin) di bawah ini:

*“karena dia sendiri yang datang minta uang dan bilang ini sawahku di sana pegang”*⁵

Dari komentar di atas, bahwasanya rahinlah yang datang ke murtahin untuk meminjam uang lalu menawarkan sendiri sawahnya untuk digadai dan digarap. Dari hal tersebut berarti kegiatan gadai tanah (sawah) di Desa Singa memang sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya walaupun tanpa diminta murtahin.

2. Faktor ingin menolong

Berangkat dari rasa tolong menolong, maka si penerima gadai (murtahin) meminjamkan uangnya kepada si penggadai (rajin). Karena sebagai rasa kebersamaan dalam masyarakat yang didasari tolong-menolong antar sesama manusia. Begitu pula sebaliknya bagi rahin merasa bergembira karean mendapat

⁵ Sahorang (52 tahun), pemegang gadai (murtahin) Masyarakat Desa Singa Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 26 September 2017.

pinjaman dalam bentuk gadai, juga sebagai rasa terima kasih telah dipinjamkan uang maka mereka rela menyerahkan sawahnya kepada si penerima gadai sebagai jaminan untuk digarap (di manfaatkan). Seperti yang diungkapkan bapak Tahir:

*“karna dia butuh uang, kebetulan ada jadi saya pinjamkan”*⁶

Dari komentar tersebut, dapat dimaknai bahwa alasan penerima gadai (murtahin) melakukan gadai karena kasihan terhadap (rahin) sehingga ia ingin menolongnya dengan meminjamkan uang kepadanya. Dari hasil tersebut penulis berkesimpulan bahwa dalam melakukan gadai di masyarakat Desa Singa terdapat unsur tolong-menolong.

Adapun hak dan kewajiban penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) yaitu:

1. hak dan kewajiban penggadai (rahin):

Hak penggadai (rahin) yaitu:

- a. berhak untuk mendapatkan sejumlah uang dari penerima gadai (murtahin)
- b. berhak untuk mendapatkan pengembalian sawah yang digadaikan sesudah melunasi pinjaman utangnya.

Kewajiban penggadai (rahin) yaitu:

- a. berkewajiban untuk menyerahkan sawahnya dan dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin)
- b. berhak untuk melakukan perjanjian baru dengan orang lain (bagi hasil) atas barang gadai (sawah)
- c. berhak untuk menagih uang pinjaman jika sudah sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- d. berhak untuk tetap menahan barang gadai selama pinjaman belum dilunasi (jatuh tempo) oleh pemberi gadai (rahin)

⁶ Tahir (54 tahun), pemegang gadai (murtahin), Masyarakat Desa Singa Bulukumba. Wawancara, Bulukumba 26 September 2017.

Kewajiban penerima gadai

- a. berkewajiban untuk menyerahkan uang pinjaman kepada penggadai (rahin) atas terjadinya transaksi gadai.
- b. berkewajiban untuk mengembalikan sawah yang dijadikan jaminan kepada penggadai (rahin) jika sudah melunasi pinjaman utangnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pemanfaatan barang gadai yang terjadi dalam pelaksanaan gadai tanah (sawah) di masyarakat Desa Singa Bulukumba dilakukan oleh penerima gadai (murtahin).

Bapak Ibrahim (murtahin): “iya tentumi saya yang kerja, dan saya yang ambil hasilnya”.⁷

Ibu Sahorang (murtahin): ”.....Bukan, nakerjai orang. Nanti hasilnya baru dibagi dua”.⁸

Pemanfaatan barang gadai dikelola atau digarap oleh penerima gadai (murtahin). Selain itu ada pula yang dikelola atau digarap oleh pihak ketiga atau orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil antara penggarap dengan si penerima gadai (murtahin). Meskipun kebanyakan sawah yang dijadikan sebagai jaminan yang digarap atau dikelola oleh penerima gadai itu sendiri. Namun hasil dari pemanfaatan barang gadai tidak lakukan bagi hasil antar si penggadai (rahin) dengan penerima gadai (murtahin) setelah dipisahkan dengan biaya pemeliharaan. Hasil tersebut semuanya diambil oleh penerima gadai (murtahin). Bahkan hasil yang telah diambil (barang gadai) tersebut biasanya sudah melebihi dari utang si penggadai (rahin). Oleh karena itu, pemanfaatan barang gadai (sawah) yang terjadi dalam masyarakat di Desa Singa harus ditinjau ulang karena merugikan bagi pemberi gadai.

⁷ Ibrahim (34 tahun), penerima gadai (murtahin), Masyarakat Desa Singa Bulukumba. *Wawancara*, Bulukumba, 26 September 2017.

⁸ Sahorang (52 tahun), penerima gadai (murtahin), Masyarakat Desa Singa Bulukumba. *Wawancara*, Bulukumba, 26 September 2017.

C. Pandangan Hukum Islam terhadap mapasanra (gadai) tanah sawah di Masyarakat Desa Singa

Gadai merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam bentuk hitang piutang dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan atas hutang. Perjanjian gadai ini dibenarkan dengan firman Allah swt dlam AL-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.⁹

Dari ayat tersebut bila dicermati maka illat hukum yang terkandung adalah adanya faktor kebutuhan, hal ini dijumpai dalam pendapatnya as-Saukani yang mengemukakan bahwa “barag siapa yang dalam perjalanan melakukan perjanjian hutang piutang dan tidak dijumpai seorang pun menulis maka untuk meringankannya (hutang piutang) diadakannya jaminan yang dipegang”¹⁰ jadi

⁹ Kementerian Agama RI, *AL-Qura'an dan Terjemahnya Edisi Translitrasi Az-Zukhruf* (Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 49.

¹⁰ Imam Muhammad' Ali Ibn Muhammad as-Saukani, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah 1410/1994 M),h. 383.

adanya utang piutang dengan barang jaminan (gadai) karena kebutuhan yang mendesak. Seperti yang di ungkapkan Ibu Sukawati (rahin):

Karena biaya sekolah, dan kalau sudah butuh uang, mau membayar kasian. dan tidak ada musim panen, apalagi pekerjaanku cuman seorang petani, suai juga penghasilannya tidak seberapa. Jadi terpaksa di pasanrraki (digadaikan) itu sawah.....¹¹

Mengenai hak dan kewajiban rahin dan murtahin, penulis berpendapat bahwa hak dan kewajiban rahin dan murtahin di Desa Singa tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam. Akan tetapi, masih ada beberapa yang belum terpenuhi seperti: murtahin berhak menjual barang gadai apabila jatuh tempo. Dan rahin berkewajiban merelakan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu ditentukan penggadai (rahin) tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

Sedangkan yang terjadi di Desa Singa Bulukumba tidak adanya penjualan barang gadai(sawah) meskipun telah jatuh tempo dan rahin belum mampu untuk membayarnya maka yang terjadi yaitu: murtahin tetap berhak untuk menahan dan memanfaatkan sawah tersebut hingga rahin melunasi utangnya. Dan rahin harus merelakan sawahnya untuk tetap di manfaatkan. Karena mereka memang tidak mau menjual sawah tersebut (barang gadai). Seperti yang di ungkapkan rahin dan murtahin berikut ini:

Bapak Tahir (murtahin): siapa yang mau berani jual sawahnya orang..... nassami (sudah tentu) tidak mau punyaanya jual sawahnya.”¹²

Ibu Lina (rahin):

Jelasmi tidak saya relakan kalau dijual sawahku. Justru itu tidak ditentukan waktunya, karena kalau ditentukan waktunya terus sudah jatuh tempo lalu uangnya belum ada pasti lebih susah lagi.¹³

¹¹ Sukawati (35 tahun), pihak penggadai (rahin), Masyarakat Desa Singa Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba 25 September 2017.

¹² Tahir (53 tahun), pemegang gadai (murtahin), Masyarakat Desa Singa Bulukumba. *Wawancara*, Bulukumba 26 September 2017.

¹³ Lina (30 tahun), pihak penggadai (rahin), Masyarakat Desa Singa Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 26 september 2017.

Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa pada masyarakat desa Singa tersebut tidak adanya penjualan sawah (barang gadai) karna rahin memang tidak ingin menjual tanah (sawah) yang digadaikan tersebut karena rahin beranggapan bahwa sawah (barang gadai) merupakan salah satu asetnya. Dari hal tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hal ini tidak sesuai dengan Hukum Islam karena mengenai waktu jatuh tempo jika rahin tidak mampu melunasi utangnya maka murtahin boleh menjual barang tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus dikembalikan pada rahin, namun bila kurang dari jumlah utang, maka pihak rahin harus menambahnya agar utang tersebut terbayar lunas. Dan apabila rahin tidak mau menjual sawahnya (barang gadai) maka murtahin boleh menempuh jalur hukum dan hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (rahin).

Hasil penelitian yang dilakukan, pemanfaatan barang gadai yang terjadi dalam pelaksanaan sanrra (gadai) tanah sawah pada masyarakat desa Singa Bulukumba dilakukan oleh penerima gadai (murtahin), seperti ungkapan berikut: Bapak Ibrahim (murtahin): “iya tentu saya yang kerja, saya yang ambil hasilnya”¹⁴

Ibu Sahorang:

..... bukan. tetapi orang yang kerja. Nanti hasilnya baru dibagi dua dan kadang-kadang dua atau tiga karung ku bagikan sama dia satu kali panen. Kalau musim hujan biasa 3 karung. Kalau musim kemarau 2 karung. Tidak tau sudah berapa lama kira-kira adami mungkin 5 tahun saya pegang ini sawahnya.¹⁵

Pemanfaatan barang gadai dikelola atau digarap oleh pemegang gadai (murtahin) selain itu ada pula yang dikelola atau di garap oleh pihak ketiga atau orang lain

¹⁴ Ibrahim (34 tahun), penerima gadai (murtahin), Masyarakat Desa Singa Bulukumba. *Wawancara*, Bulukumba, 26 September 2017.

¹⁵ Sahorang (52 tahun), penerima gadai (murtahin), Masyarakat Desa Singa Bulukumba. *Wawancara*, Bulukumba, 26 September 2017.

yang di percaya dengan ketentuan bagi hasil bagi penggarap dengan penerima gadai (murtahin). Namun hasil dari pemanfaatan barang gadai tidak dilakukan bagi hasil antar si penggadai (rahin) dengan pemegang gadai (murtahin) setelah dipisahkan dengan biaya pemeliharaan. Hasil tersebut semuanya di ambil oleh pemegang gadai (murtahin). Bahkan hasil yang telah di ambil dari sawah (barang gadai) tersebut biasanya sudah melebihi utang si penggadai (rahin). Misalnya bapak U (rahin) menggadaikan sawahnya kepada Ibu M (murtahin) dengan memperoleh utang sebesar 3.500.000 dengan ketentuan batas waktu tertentu. Dan katanya Ibu M sudah mengambil manfaat dari sawah tersebut selama kurang lebih 5 tahun. Diketahui 2 kali panen dalam setahun. Satu kali panen terkadang ia mendapat hasil 4-6 karung. Jika harga perkarungnya adalah 350.000 maka dijumlahkan hasil yang diperoleh ibu M sekitar 21.000.000 belum termasuk laba bersih, dan itu sudah melebihi utang si penggadai.

D. Analisis Pemanfaatan Gadai di Tinjau dari Segi masalah dan mudharatnya

Menurut pandangan hukum Islam mengenai pemanfaatan barang gadai pada dasarnya barang gadai tidak boleh di ambil manfaatnya kecuali dengan seizin pemilik barang (rahin). Dalam hal ini di Desa Singa penulis berpendapat bahwa murtahin boleh memanfaatkan sawah (barang gadai) dikarenakan pada awal akad rahin telah menyerahkan dan mengizinkan sawahnya untuk digarap dan dimanfaatkan oleh murtahin, karena rahin masih ada sumber lain untuk dipakai dalam melunasi utangnya. Di sisi lain ulama Hanafiyah berpendapat bahwa fungsi dari barang gadai (marhun) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi murtahin sehingga barang tersebut tidak di manfaatkan oleh penerima gadai (murtahin) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal

barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal ini dapat mendatangkan “kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (rahin).¹⁶

Batas waktu jatuh tempo mengenai pemanfaatan sawah pada Desa Singa dalam hal ini pelaksanaan gadai sawah, pada saat tiba masa jatuh tempo dan si rahin belum mampu untuk melunasi utangnya, pihak murtahin tetap memanfaatkan dan melanjutkan gadai sawah tersebut dan tidak ada penuntutan terhadap rahin untuk menjual tanah sawah tersebut. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam seharusnya pada saat jatuh tempo dan rahin belum mampu untuk melunasinya maka murtahin berhak untuk menuntut sawah (batang gadai) tersebut untuk dijual. Dan jika rahin tidak mau menjualnya, maka murtahin boleh menyelesaikan melalui jalur hukum.

Mengenai pelunasan tanpa batas waktu tertentu, asalkan uang sudah dikembalikan maka sawah yang digadaikan pun kembali menjadi hak pemiliknya. Dalam hal ini hukum Islam berpandangan bahwa seharusnya ada batas waktu yang ditentukan pada saat shigat (serah terima) supaya nantinya lebih memudahkan si rahin dan murtahin dalam menyelesaikan gadai sawahnya.

Adapun hikmah mengenai pelaksanaan gadai. Keadaan setiap orang berbeda ada yang kaya dan ada yang miskin. Dan terkadang di suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, diapun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminkannya. Hingga ia mendatangi orang-orang tertentu yang dianggap mampu meminjaminya. Dan mendatangi orang yang bisa menolong dan menyelesaikan masalahnya, dengan cara menawarkan tanahnya (sawah) untuk digadai sebagai jaminan atas utangnya, hingga ia melunasi utangnya.

¹⁶ Muhammad dan Sholikul Hadi *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*, Edisi 1, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 76.

Oleh karena itu, Allah swt. mensyariatkan *ar-rahn* (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadai (rahin), pemberi utang (murtahin), dan masyarakat. Untuk rahin, ia mendapat keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Adapun murtahin, dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan diapun mendapatkan keuntungan syar'i bila ia berniat baik, maka ia mendapatkan pahala dari Allah swt. adapun kemaslahtan yang kembali kepada masyarakat, yaitu saling memberikan kecintaan dan kasih sayang diantara manusia, karena ini termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis dan memperkecil permusuhan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menganalisis praktek pelaksanaan *mappasanrra* tanah sawah di Desa Singa maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai tanah sawah di desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dilakukan sejak dahulu dengan alasan perseolan ekonomi dan sudah sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam walaupun proses gadainya hanya dilakukan secara lisan, yaitu pihak *rahin* mendatangi dan menawarkan sawahnya kepada *murtahin* untuk digadaikan dengan maksud untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang dari pertemuan tersebut *rahin* dan *murtahin* mengadakan kesepakatan.
2. Praktek pelaksanaan *pasanra* (gadai) tanah sawah di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba menurut pandangan hukum Islam sudah sah dan sesuai dengan ketentuan karena *rahin* dan *murtahin* adalah orang yang *baligh*, berakal dan cakap bertindak hukum. Dan dari *marhun* sendiri juga sah menurut hukum Islam karena sawah tersebut merupakan barang yang sah untuk diperjualbelikan jadi sah pula untuk digadaikan, namun dari sisi serah terimanya tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena *rahin* tidak menyerahkan sertifikat tanah yang digadaikan, sedangkan menurut ketentuan harus menyerahkan sertifikat tanah sebagai bukti otentik karena sawah termasuk kategori benda tidak bergerak. Jadi hal ini tidak sah menurut hukum Islam. dan mengenai *marhun bih* (hutang) sudah terpenuhi. Jadi secara keseluruhan analisis akad gadai tanah sawah telah sah dan sesuai menurut

hukum Islam hanya saja dalam serah terima *marhun* tidak sempurna karena *rahin* tidak menunjukkan sertifikat tanahnya.

3. Analisis pemanfaatan *mappasanra* yang ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemudharatannya yang terjadi di Desa Singa bahwa *mappasanra* bisa mendatangkan kemaslahatan untuk orang yang menggadai (*rahin*), pemberi utang (*murtahin*), dan masyarakat, karena dapat menutupi juga dapat keuntungan jika berniat baik dan memberikan cinta dan kasih juga termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Dan dapat menimbulkan kemudharatan ketika fungsi dari barang gadai sebagai barang jaminan dan kepercayaan tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai maka berarti menghilangkan manfaat barang tersebut, dan dalam pandangan hukum Islam pada saat jatuh tempo dan *rahin* belum bisa melunasinya maka *murtahin* berhak menjual tanah tersebut, dan jika *rahin* tidak mau menjualnya, maka *murtahin* boleh menyelesaikan melalui jalur hukum.

B. Implikasi Penelitian

1. Hendaklah para pemuka masyarakat dalam hal ini adalah para ulama setempat, agar sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai pelaksanaan sanrra (gadai) yang sesuai dengan pandangan hukum Islam secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan.
2. Kepada rahin dan murtahin, selain kepercayaan yang mereka miliki bersama. Hendaknya dalam bertransaksi gadai tanah (sawah) menggunakan catatan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dibawah notaris sebagai bukti otentik jika diantara mereka terjadi perselisihan.
3. Hendaknya dalam berinteraksi gadai tanah (sawah) selain melibatkan pihak ketiga (saksi) juga melibatkan pihak pemerintah seperti kepala Desa dan mengarsipkannya. Agar dikemudian hari, apabila terjadi perselisihan mudah dalam menyelesaikannya.
4. sebagai sumber pembelajaran hukum yang dapat diterapkan oleh pembaca khususnya dalam masyarakat di Desa Singa dalam melaksanakan praktek *mappasanrra* tanah sawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah*. Jakarta: Tazkia Institute, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Koleksi Hadits-hadits Hukum, jilid 3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- As-Saukani, Imam Muhammad 'Ali Ibn muhammad. Fath al-Qadir. Beirut: Dar alKutub al-'ilmiyyah, 1410 H/1994 M.
- Asy-Syaukani, Muhammad Bin Ali. Nayl Al-Authar, Juz 5; Damaskus: Dar Al-Fikr,
- Basyarahil, Abdul Aziz Salim. Tafsir fi Zhilalih Quran di Bawah Naungan Al Quran. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam. ed. Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Basyir, Ahmad Ahzar. *Hukum Islam Tentang Riba Utang-Piutang Gadai*, Bandung: Al- Ma'arif, 1994.
- Departemen Agama, RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1998.
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Hadi, Muhammad Sholikul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Hadi, Muhammad Sholikhul. Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional, Edisi 1; Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Istiqamah. *Hukum Waris Dan Benda*. Sultan Alauddin: Alauddin University Pers, 2012.
- Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalm Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Batavia: Kementrian Agama RI, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat, Ed. 1, cet. 1; Jakarta: Amzah, 2010.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. Hukum Jaminan. Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2003.
- Soimin, Sudaryo. *Status Hak dan Pembebasan Tanah* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Mustofa, Imam. Fiqih Mu'amalah Kontemporer Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Juz III, ahli bahasa Abdurrahman, dkk. Semarang: Asy-Syiyfa, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Al-fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar al-fikr, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, cet. III, Beirut: Dar Al-Firk, 1981.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sulisteni, Eliset. *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata.t.t. t..th*.
- Syafei, Rahmat “Konsep Gadai; Ar-Rahn dalam Fikih Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial” T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* III.Cet. II; Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995.
- Tim Visi Yustisia. *KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & KUHA Perdata (KitabUndang-Undang Hukum Acara Perdata)*. Jakarta: Visimedia,2015.
- Wetboek, Burgerlijk. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-terjemahnya*. Permata Press, 2010.
- Zuhaili, Wahba. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, cet. III; Damaskus: Dar AlFikr,1989.
-, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 5.Damaskus: Dar Al-Fikr,1989.
-, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*. Jilid 4; Beirut: dar Al-Fikr, 2002.
-, *Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Penggadai (rahin)

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ibu menggadaikan tanah?
2. Siapa yang dilibatkan dalam pelaksanaan gadai tanah?
3. Kapan dan dimana pelaksanaan akad gadai tanah dilakukan?
4. Kapan barang gadai atau tanah yang digadaikan diserahkan kepada murthin?
5. Kapan rahin menerima uang hasil dari gadai sawah (marhun bih)?
6. Apakah pihak penggadai (rahin) menentukan batas waktu dalam menggadaikan tanah?
7. Siapakah yang memanfaatkan barang gadai (sawah) yang digadaikan?
8. Apakah dalam pelaksanaan gadai tanah pihak rahin merasa diuntungkan atau sebaliknya dirugikan? alasannya?
9. Apakah pernah terjadi perjanjian gadai sudah jatuh tempo tetapi penggadai belum melunasi uang pinjaman? kalau terjadi apakah alasannya?
10. Apakah ada penjualan barang gadai (sawah) apabila telah jatuh tempo?

B. Untuk Pemegang Gadai (murtahin)

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ibu melaksanakan akad gadai tanah?
2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan akad gadai tanah sawah?
3. Kapan dan dimana pelaksanaan akad gadai dilakukan?
4. Kapanakah murtahin menerima barang gadai (marhun) atau tanah yang digadaikan?
5. Kapanakah murtahin menyerahkan marhun bih (uang hasil gadai) kepada rahin?
6. Apakah pihak penerima gadai (murtahin) menentukan batas waktu dalam transaksi gadai tanah?
7. Siapakah yang memanfaatkan barang gadai (sawah) yang digadaikan?
8. Apakah dalam pelaksanaan gadai tanah pihak murtahin merasa dirugikan atau sebaliknya merasa diuntungkan? Alasannya?
9. Apakah pernah terjadi barang gadaian sudah jatuh tempo tetapi belum dikembalikan kepada pemilik gadai (rahin? Kalau terjadi apakah alasannya?
10. Apakah ada penjualan barang gadai (sawah) apabila sudah jatuh tempo?

L

A

M

P

I

R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

*A*LAUDDIN

M A K A S S A R

N

DOKUMENTASI BERSAMA PEMEGANG GADAI (*RAHIN*) DESA SINGA KECAMATAN
HERLANG



DOKUMENTASI BERSAMA PIHAK PENGGADAI (*MURTAHIN*) DESA SINGA KECAMATAN
HERLANG



DOKUMENTASI BERSAMA PIHAK RAHIN DESA SINGA KECAMATAN HERLANG



DOKUMENTASI SAWAH YANG DIGADAIKAN DI DESA SINGA KECAMATAN HERLANG



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap Nurul Hazanah, lahir di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 05 Maret 1995. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan suami isteri Bapak Abd. Hakim dan Ibu Syamsiah. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2001 di SD Negeri 287 Domenga dan lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Satap 1 Kajang, dan lulus pada tahun 2010. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Bulukumba dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada jurusan Hukum Pidana Ketatanegaraan (HPK), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Selama berstatus sebagai mahasiswa, penulis aktif dalam organda KKMB Komisariat UIN Alauddin Makassar. Untuk memperoleh gelar sarjana hukum, penulis menyusun skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Mappasanrra Tanah Sawah (Studi Kasus Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba)”.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR